

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kegunaan-Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*)

Menurut (Pasolong, 2023) menjelaskan bahwa teori pengambilan keputusan merupakan panduan bagi individu atau kelompok dalam proses membuat pilihan. Teori kegunaan-keputusan berisi tentang kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan akuntansi, yang dikenal sebagai “*A Theory of Accounting to Investors*”. Teori ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan bagi investor dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Chambers, yang menekankan pentingnya memahami jenis informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Decision-Usefulness Theory menyoroti nilai dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan catatan bahwa informasi tersebut harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Kegunaan dari informasi akuntansi mencakup elemen-elemen penting yang harus diperhatikan oleh penyaji informasi, sehingga cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan. Selain itu, teori ini juga mencerminkan berbagai aturan yang perlu diikuti oleh elemen-elemen dalam laporan keuangan agar dapat memberikan manfaat

maksimal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Ramadani et al., 2022).

Teori kegunaan-keputusan membahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar informasi akuntansi memiliki kualitas yang berguna dalam pengambilan keputusan mencakup berbagai elemen penting dalam penyajian informasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Dasar dari teori kegunaan-keputusan adalah tujuan akuntansi, yaitu menyediakan informasi keuangan tentang suatu organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi juga berkaitan dengan para pemangku kepentingan, yaitu memberikan informasi keuangan yang relevan untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. Sikap manajemen terhadap penerapan standar akuntansi erat kaitannya dengan tujuan mereka dalam menyajikan informasi akuntansi yang mencerminkan kondisi dan hasil keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Konsep ini diwujudkan melalui seperangkat ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap komponen laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat digunakan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Lestari & Dewi, 2020).

Kaitan teori ini dengan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah adalah tentang bagaimana nilai informasi laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah/kota dapat menjadi dasar atau referensi dalam pengambilan

keputusan dimasa depan, dimana keputusan tersebut akan memberikan manfaat bagi para pengguna informasi. Selain itu, juga dibahas mengenai peran sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem akuntansi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan handal.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merujuk pada sifat atau ciri khas yang dimiliki seseorang, yang berkaitan dengan standar yang dianggap efektif atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugas atau menghadapi situasi tertentu. Selain itu, elemen-elemen dalam laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar mampu memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Spencer, n.d., 1993). Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Seperti yang telah dijelaskan, aspek utama dari sumber daya manusia terletak pada sejauh mana mereka memberikan kontribusi terhadap organisasi. Sedangkan aspek utama dari individu adalah bagaimana kontribusi tersebut diapresiasi atau diperlakukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan mereka secara keseluruhan (Marjuni, 2015).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46a Tahun 2003 yang mengatur Pedoman Penyusunan

Standar Kompetensi untuk Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, kompetensi diartikan sebagai kemampuan serta sifat atau karakteristik yang melekat pada seorang pegawai negeri sipil. Ini mencakup berbagai elemen penting, termasuk pengetahuan atau pemahaman yang mendalam, keterampilan teknis dan non-teknis, serta sikap dan perilaku yang sesuai. Semua komponen ini sangat penting agar seseorang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan cara profesional dan mencapai hasil kerja yang efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Annisa, 2023).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan setiap orang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan efektif. Kemampuan ini tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pendidikan formal dan pengalaman kerja yang cukup. Keterampilan ini sangat penting bagi pemerintah daerah ketika mereka membuat laporan keuangan karena laporan tersebut harus dibuat secara akurat, jujur, dan sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan. Ketika pejabat pemerintah daerah memiliki keterampilan yang tepat, mereka dapat membuat laporan keuangan yang akurat yang dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang baik, meminta pertanggungjawaban, dan meningkatkan cara mereka mengelola uang di masyarakat (Fitriani & Riyadi, 2021). Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam

sebuah organisasi, karena salah satu faktor yang memengaruhi kemajuan dan keberhasilan organisasi adalah kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya (Dwi Susliyanti, 2021).

2.1.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Pengertian

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. SAP disajikan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang juga dilengkapi dengan pengantar serta dirancang berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kumpulan prinsip akuntansi yang harus diikuti agar laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen yang disusun secara terstruktur dan sistematis, yang memuat informasi terkait posisi keuangan serta berbagai transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (Mahartini et al., 2021). Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi pemerintahan, serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, baik untuk laporan keuangan pemerintah pusat,

maupun laporan keuangan pemerintah daerah (Istri Diah Endiyani et al., 2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini wajib diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, yang minimal mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut juga menjadi wujud pelaksanaan dari ketentuan Pasal 184 ayat 1 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (Mujihal Fikri Jalil, 2021).

b. Basis Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki 2 jenis yang dapat digunakan, yaitu:

1) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas biasanya digunakan untuk membuat Laporan Realisasi

Anggaran. Dalam pencatatannya dilakukan apabila pendapatan di akui disaat kas sudah diterima oleh Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Dalam basis kas ini juga untuk pencatatan pengeluaran dapat diakui apabila kas sudah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Pendekatan ini memberikan gambaran langsung mengenai arus kas yang masuk dan keluar, tetapi dapat mengabaikan transaksi yang belum terselesaikan, sehingga tidak memberikan pandangan menyeluruh tentang kesehatan finansial suatu entitas dalam jangka panjang.

2) Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua yaitu SAP yang mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang, dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam APBN/APBD.

Pencatatan dengan Basis akrua dalam Neraca seperti pada pengakuan dan pencatatan aset, kewajiban, serta ekuitas dilakukan pada saat terjadinya peristiwa atau kondisi yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah tanpa mempertimbangkan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PP No. 71 tahun 2010). (Jusmani et al., 2022).

c. Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010) indikator penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut :

1) Basis Akuntansi

Laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan basis akrual, yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas saat hak atau kewajiban terjadi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Namun, jika peraturan perundang-undangan mengharuskan laporan keuangan menggunakan basis kas, maka entitas wajib menyusunnya sesuai ketentuan tersebut. Pendapatan diakui saat hak untuk menerimanya terpenuhi, sedangkan beban diakui saat kewajiban yang mengurangi kekayaan bersih muncul, meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Selain itu, bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa juga disajikan dalam laporan pendapatan. Jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun dengan mengakui pendapatan dan penerimaan pembiayaan saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan saat kas dibayarkan. Sebaliknya, jika anggaran disusun dengan basis akrual, maka LRA juga disusun menggunakan basis akrual.

Untuk Neraca, basis akrual berarti pengakuan dan pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dilakukan saat transaksi atau kejadian yang mempengaruhi keuangan pemerintah terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau pengeluaran kas.

2) Prinsip Nilai Historis

Aset direcord berdasarkan jumlah kas dan setara kas yang telah dikeluarkan atau sesuai dengan nilai wajar imbalan yang diberikan saat aset tersebut diperoleh. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar perkiraan jumlah kas dan setara kas yang akan dibayarkan di masa mendatang untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Prinsip Perioditas

Prinsip Periodisitas mensyaratkan agar aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan suatu entitas dibagi ke dalam interval waktu tertentu. Hal ini bertujuan supaya kinerja entitas dapat dinilai secara berkala, serta kondisi sumber daya yang dimilikinya dapat dipantau dengan jelas. Meskipun periode pelaporan yang paling umum adalah

tahunan, pelaporan secara bulanan, triwulanan, maupun semesteran juga sangat dianjurkan.

4) Prinsip Konsistensi

Prinsip konsistensi mengharuskan entitas pelaporan untuk menerapkan perlakuan akuntansi yang sama terhadap peristiwa serupa dari satu periode ke periode berikutnya. Meski demikian, perubahan metode akuntansi tidak sepenuhnya dilarang. Metode baru bisa diterapkan jika dianggap mampu menyajikan informasi yang lebih relevan dan akurat dibandingkan metode sebelumnya. Dampak dari perubahan metode tersebut wajib dijelaskan secara transparan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan merupakan alat penting untuk menyampaikan informasi keuangan secara lengkap dan terstruktur kepada para pengguna, seperti manajemen, auditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Tujuan penyajian informasi dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas. Informasi tersebut dapat disajikan langsung di halaman depan laporan keuangan, seperti neraca dan laporan operasional, atau menggunakan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk menjelaskan angka-angka yang ada

di laporan utama. Penyajian ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

6) Substansi mengungguli bentuk formal

Informasi bertujuan agar menggambarkan secara wajar transaksi dan peristiwa lain yang memang harus dilaporkan. Oleh karena itu, transaksi atau peristiwa tersebut harus direcord dan dilaporkan berdasarkan substansi dan realitas ekonomi yang mendasarinya, tidak semata-mata dari segi formalitas.

7) Penyajian Wajar

Agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar, penyusun perlu menerapkan pertimbangan yang cermat ketika menghadapi situasi dan peristiwa yang tidak pasti. Ketidakpastian tersebut harus diakui dengan cara menjelaskan sifat serta tingkat ketidakpastian tersebut melalui penerapan pertimbangan yang bijaksana dalam proses penulisan laporan keuangan. Konsiderasi ini mencakup sikap teliti membuat estimasi di tengah ketidakpastian, agar nilai aset atau pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban tidak diremehkan.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Inovasi dalam bidang teknologi informasi mencakup kemajuan pada perangkat keras, perangkat lunak, sistem penyimpanan data, serta teknologi komunikasi. Penggunaan teknologi informasi berperan penting dalam mempercepat pengelolaan data transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan secara efisien, dan juga meminimalkan kekeliruan proses memposting berbagai macam dokumen seperti buku, jurnal, dan buku besar. Hal ini memungkinkan terciptanya laporan keuangan yang rinci yang menggambarkan kondisi keuangan secara jelas. Selain itu, laporan keuangan ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah (Burhanuddin, 2021).

Pemanfaatan teknologi dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Perangkat

Perangkat merupakan komponen penting untuk menciptakan komputer yang memiliki fungsi yang berguna bagi para pengguna dalam membantu menjalankan tugasnya. Selain itu, Perangkat menggambarkan seluruh elemen yang mendukung *hardware* dan sistem jaringan internet.

a. *Hardware*, adalah kumpulan elemen fisik yang membentuk sistem komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian

atau komponen fisik komputer, seperti monitor, keyboard, dan sebagainya, yang kesemuanya merupakan objek fisik yang nyata. Sebaliknya, perangkat lunak adalah instruksi yang dapat disimpan dan dijalankan oleh perangkat keras. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang mengarahkan prosesor komputer untuk melakukan operasi tertentu. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak membentuk sistem komputasi yang dapat digunakan.

- b. Jaringan internet, Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat komputer di seluruh dunia. Jaringan ini menawarkan pilihan komunikasi, termasuk transmisi data, akses informasi, dan layanan digital lainnya. Melalui internet, orang dapat bertukar informasi dengan cepat dan real-time. Internet juga mendukung berbagai aktivitas dalam pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sosial.

2) Pengelolaan data keuangan

Teknologi informasi mencakup sistem yang dirancang untuk membantu dalam mengumpulkan, mengelola, menyajikan, merujuk, dan mengkomunikasikan data, terutama informasi keuangan. Teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data keuangan, terutama di

pemerintahan dan organisasi. Pengelolaan data keuangan melalui teknologi informasi berarti mengkomputerisasi seluruh kegiatan akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Sistem ini juga menggunakan perangkat lunak yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menghasilkan laporan akuntansi dan manajemen yang lengkap, akurat, dan terintegrasi di seluruh departemen dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, teknologi informasi merupakan alat utama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data keuangan yang dapat diandalkan.

3) Perawatan

Adapun pemeliharaan perangkat yang harus dilakukan secara teratur maupun perbaikan peralatan yang rusak atau usang agar perangkat yang digunakan agar mengurangi terjadinya kendala pada saat melakukan tugas dalam pekerjaannya. Perawatan perangkat yang tepat sangat sepadan dengan investasinya. Berikut beberapa manfaat jangka panjang dari perawatan peralatan preventif: memperpanjang umur peralatan dan mengurangi kebutuhan untuk membeli peralatan baru, mencegah waktu henti yang tidak direncanakan yang dapat merugikan dan mengganggu proses manufaktur, menghindari perlunya perbaikan yang mahal akibat kelalaian, menjaga peralatan tetap beroperasi tanpa

gangguan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, memastikan sistem bekerja secara efisien untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional, mencegah masalah kecil berkembang menjadi masalah besar yang memakan waktu dan biaya perbaikan yang mahal karena perbaikan yang rumit seringkali membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu henti yang lebih lama, meningkatkan nilai jual kembali peralatan dengan catatan layanan yang baik, meningkatkan ekuitas dan daya beli dengan menjaga nilai aset, mengurangi cedera dan kematian, dan dengan demikian mengurangi liabilitas, akibat peralatan yang rusak, memaksimalkan cakupan garansi dengan memiliki catatan layanan yang terperinci untuk menunjukkan bahwa perawatan telah dilakukan secara berkala.

2.1.5 Nilai Informasi Laporan Keuangan

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan pengguna dalam proses pengambilan keputusan, pengguna, serta kepercayaan pengguna terhadap informasi tersebut (Kartika dan Amalia (2018) dalam (Izzati, 2021). Informasi yang berguna bagi pengguna adalah informasi yang memiliki nilai. Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus memenuhi sejumlah karakteristik kualitatif yang diperlukan (Rahman & Widyastuti, 2022). Sifat kualitatif dalam laporan keuangan berfungsi

sebagai standar normatif yang wajib dipenuhi oleh informasi akuntansi agar tujuan pelaporan dapat tercapai dengan baik. Informasi dianggap berguna apabila mudah dipahami oleh para pengguna dan disajikan menggunakan istilah yang relevan dengan konteks pemakaiannya. Ini diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (BPK, 2010). Berikut ini terdapat empat ciri utama yang menjadi persyaratan normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat mencapai standar kualitas yang diinginkan, yakni :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan mampu memengaruhi keputusan para pengguna. Hal ini tercapai dengan memberikan bantuan dalam menilai kejadian-kejadian yang sudah terjadi maupun yang sedang berlangsung, sekaligus membantu memperkirakan kondisi yang akan datang. Selain itu, laporan tersebut juga dapat mengkonfirmasi atau memperbaiki penilaian yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, informasi yang relevan dalam laporan keuangan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya.

Informasi yang relevan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*), Informasi membantu pengguna dalam memverifikasi atau menyesuaikan harapan yang sudah mereka tetapkan.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*), Informasi ini membantu pengguna dalam meramalkan keadaan dimasa depan berdasarkan data dari masa lalu dan situasi saat ini.
 - c. Kesesuaian waktu, Informasi harus diproses dengan cepat untuk memaksimalkan nilainya dan memberikan panduan yang jelas bagi proses penyusunan keputusan. Salah satu faktor penting yang menentukan relevansi dan dampak informasi adalah keakuratan analisisnya. Karena keputusan yang sedang dibahas, informasi yang disajikan mungkin tidak sepenuhnya relevan saat ini. Hal terpenting adalah menyampaikan informasi dengan cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan mereka sehingga mereka dapat merespons situasi secara efektif dan menelaraskan tindakan mereka dengan hasil yang diinginkan.
 - d. Kelengkapan, Informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan secara komprehensif, mencakup semua data yang dapat memengaruhi keputusan, dengan mempertimbangkan batasan yang ada.
2. Kejelasan, Setiap elemen informasi utama yang tercantum dalam laporan keuangan perlu dijabarkan secara rinci dan transparan

agar tidak menimbulkan ambiguitas atau kesalahpahaman dalam interpretasi maupun penggunaannya. Penjelasan yang jelas dan terstruktur akan membantu para pengguna laporan, baik dari kalangan internal maupun eksternal, dalam memahami makna, konteks, dan implikasi dari setiap informasi yang disajikan. Dengan demikian, risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis data keuangan dapat diminimalkan, serta keandalan dan kredibilitas laporan keuangan dapat lebih terjamin.

3. Andal

Informasi harus benar, berdasarkan fakta, jujur dan dapat diuji keasliannya. Meskipun informasi tersebut mungkin relevan, jika penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna bisa salah dalam memahami informasi tersebut. Karakteristik dari informasi yang andal meliputi:

- a. Penyajian yang jujur, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus secara akurat mencerminkan kondisi transaksi dan penelitian ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, setiap informasi atau data yang disajikan harus akurat dan tidak berliku, sesuai dengan fakta dan angka ekonomi yang mendukungnya. Informasi tidak dapat diciptakan atau dipelihara dengan cara ini; informasi hanya digunakan untuk memberikan informasi yang akurat atau untuk mengatasi suatu masalah. Tujuan utama penyajian yang

jujur adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dapat digunakan secara transparan, andal, dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan utama.

- b. Dapat diverifikasi, Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan hasil pengujian tersebut harus konsisten ketika dilakukan oleh pihak yang berbeda.
- c. Netralitas, Informasi harus disusun untuk memenuhi kebutuhan umum tanpa memihak kepada kepentingan tertentu.

4. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih berguna jika dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lain. Perbandingan dapat bersifat internal, jika kebijakan akuntansi konsisten antarperiode, atau eksternal, jika entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang serupa. Jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi, terutama pada entitas pemerintah, hal tersebut harus diungkapkan saat perubahan dilakukan.

5. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan perlu disajikan dengan cara dan istilah yang mudah dipahami oleh para penggunanya, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Oleh sebab itu, diasumsikan bahwa para pengguna memiliki pengetahuan yang

memadai tentang kegiatan serta konteks operasional entitas yang melaporkan, dan juga memiliki motivasi untuk mempelajari informasi yang disampaikan.

2.1.6 Tabel Peneliti Terdahulu

Peneliti mengambil objek pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tegal. Berikut hasil penelitian yang relevan, diantaranya:

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Wulan Riyadi, Ani Fitriani (2021)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)	Penelitian Kuantitatif Teknik Purposive Sampling Kuisisioner Analisis Regresi Linear Berganda SPSS	Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
2.	Resi Andika Putri, Siska Yulia Defitri, Witra Maison (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penelitian Kuantitatif Pendekatan Asosiatif Total Sampling	Kapasitas SDM berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap kualitas

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.	Kuisisioner Regresi Linear Berganda SPSS	informasi pelaporan keuangan.
3.	Rizky Rivaldo Peku Djawang, Anwar Made, Ati Retnasari (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian Kuantitatif Sampling Jenuh Kuisisioner Analisis Regresi Linear Berganda SPSS	Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan, namun secara parsial hanya Pemahaman SAP, Teknologi Informasi, dan SDM yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan Pengawasan Internal dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan.
4.	Oktriana Arza, Yulia Syafitri, Delori Nancy Meyla (2021)	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi	Penelitian Kuantitatif Kuisisioner Total Sampling	SDM & SAP berpengaruh, namun tidak signifikan terhadap kualitas

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang	Analisis Regresi Linear Berganda SPSS	laporan keuangan.
5.	Eni Dwi Susliyanti (2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Yogyakarta Tahun 2019)	Penelitian Kuantitatif Kuisisioner Analisis Regresi Linear Berganda SPSS 16	Kompetensi SDM tidak berpengaruh, SAP berpengaruh signifikan; secara simultan berpengaruh signifikan.
6.	Seftya Dwi Shinta dan Levy Oktri Darti (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan	penelitian kuantitatif Random Sampling Kuisisioner SPSS	SDM, TI, dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Keuangan Pada Pemerintah Kota Bengkulu		
7.	Kurnia Izzati (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Pematang)	penelitian kuantitatif Purposive Sampling Kuisisioner SPSS	SAKD dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.
8.	Asep Mulyadi Hadori (2022)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	penelitian kuantitatif Purposive Sampling Kuisisioner SPSS	SAP dan SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
9.	Lailatul	Pengaruh	penelitian	SDM, SAP, dan SPI

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Chairiyah Annisa (2023)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen)	kuantitatif Purposive Sampling Kuisisioner SPSS	berpengaruh signifikan; good governance tidak berpengaruh.
10.	Burhanudin (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank Syariah Di Kota Parepare	penelitian kuantitatif Purposive Sampling Kuisisioner SPSS	TI akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber: data diolah (2025)

2.2 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitriani & Riyadi, (2021), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2023) dan Izzati (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Selain itu, penelitian terkait juga pernah dilakukan oleh Rivaldo Peku Djawang et al., (2019), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penelitian Istri Diah Endiyani et al., (2021), menunjukkan hasil bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Arza et al., (2021), menunjukkan hasil bahwa

penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah namun tidak signifikan. Hasil penelitian Dwi Susliyanti (2021), menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H₂: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shinta & Darti, (2022) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin (2021) juga mengungkapkan bahwa Dalam penelitian Meutia & Amar, (2020) juga memperoleh hasil yang signifikan dimana pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

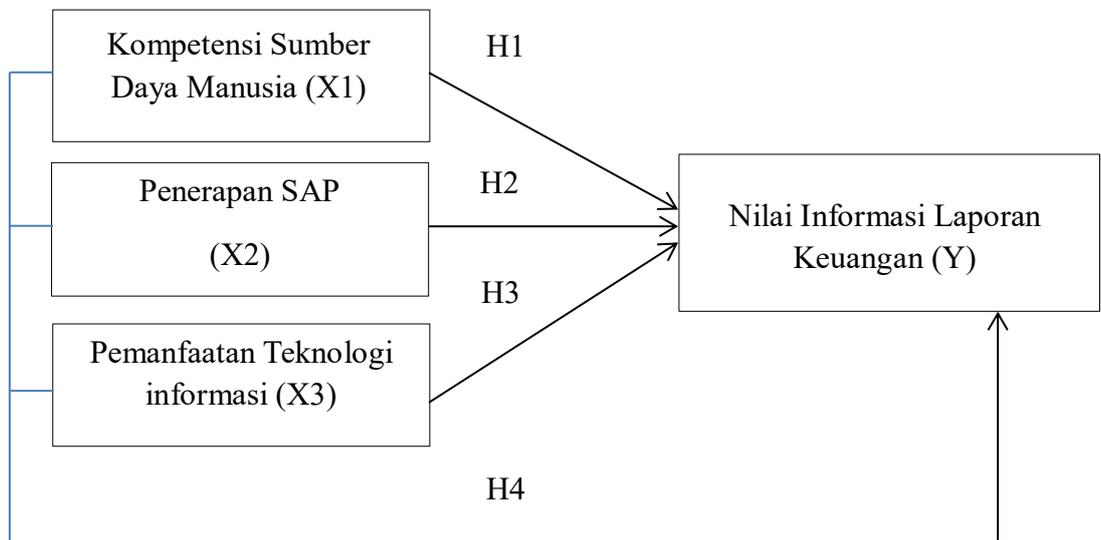
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Riyadi, (2021) terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan yang dilakukan oleh Dwi Susliyanti (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap nilai informasi laporan keuangan serta penelitian yang dilakukan oleh Shinta & Darti, (2022) tentang adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi diduga memiliki pengaruh secara simultan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

H₄: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan dari pengembangan hipotesis di atas maka dapat dideskripsikan bahwa untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen

dengan variabel dependen secara langsung maupun bersama-sama. Di bawah ini model penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2. 1 Model Penelitian